



Kesiapan UMKM Menghadapi Redenominasi Rupiah dalam Ekosistem Pembayaran Digital QRIS

Sovie Sri Anggraeni¹, Erna Nur Fadhillah², Theresia Linda Verlita³,
Shofi Nurhasna Fatin⁴

Universitas Komputer Indonesia^{1,2,3,4}

Corresponding Author's Email: namjoonsovie@gmail.com

Received: 01 21, 2026 | Accepted: 02 01, 2026 | Published: 02 03, 2026

ABSTRACT.

This research analyzes the readiness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia to face the potential implementation of the rupiah redenomination policy, focusing on digital payment transformation and QRIS adoption as the main payment system. The qualitative method involved interviews with MSME actors, consumer surveys, and comprehensive document studies combining data from regulations, reports, and scientific articles. The main findings reveal challenges such as varying levels of understanding about redenomination, difficulties in financial records and price adjustment, and technical issues within payment systems. Consumers require price clarity and protection against transaction errors and fraud during the transition. Most MSMEs have adopted non-cash payments, mainly using QRIS, yet still need educational support and infrastructure improvements. This study develops an empirical readiness framework for MSMEs consisting of four core pillars: (1) Technology and System Readiness, including digital infrastructure modernization and device subsidies; (2) Operational and Business Process Readiness, involving inventory management adaptation and strategic price-setting; (3) Payment Method Readiness, focusing on QRIS adoption, transaction cost incentives, and digital payment safety campaigns; (4) Knowledge and Institutional Readiness, encompassing structured financial literacy, community mentoring, government monitoring, and regulatory collaboration with fintech and key stakeholders. This study offers strategic policy recommendations to foster an inclusive and smooth transition for MSMEs during redenomination and digitalization. The proposed measures aim to optimize policy impact and practical readiness of business actors, thereby strengthening MSMEs' role in supporting national economic growth.

Keywords: Rupiah Redenomination, MSMEs, QRIS, Digital Payment, Framework Readiness.

How to Cite:

Sri Anggraeni, S., Fadhillah, E. N., Verlita, T. L., & Fatin, S. N. (2026). Kesiapan UMKM Menghadapi Redenominasi Rupiah dalam Ekosistem Pembayaran Digital QRIS. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 2(1), 2878-2891. <https://doi.org/10.63822/nk164h81>

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, sistem pembayaran di Indonesia berkembang sangat cepat seiring meningkatnya penggunaan transaksi secara digital. Namun, nilai rupiah dengan jumlah angka yang panjang masih menyebabkan kesulitan dalam menulis harga, mencatat transaksi, dan proses pembayaran digital. Di tengah kebutuhan efisiensi tersebut, pembahasan tentang redenominasi kembali muncul sebagai upaya menyederhanakan angka tanpa mengubah nilai uang riil. Hal ini membuat diskusi mengenai redenominasi menjadi semakin relevan, terutama terkait dampaknya terhadap kegiatan sehari-hari, harga barang, dan infrastruktur pembayaran digital. Pembahasan redenominasi yang pernah mencuat pada 2012–2013 kembali muncul dalam dokumen perencanaan Kementerian Keuangan seperti Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan PMK 2025–2029 (Alhusain, 2012). Meskipun jumlah nol yang akan dihapus dan jadwal resmi belum diumumkan, beberapa pejabat menyebutkan bahwa legislasi ini akan diselesaikan dalam beberapa tahun ke depan, sementara BI tetap memiliki peran utama dalam implementasi teknis redenominasi (Yolandha, 2025).

Bank Indonesia menegaskan bahwa redenominasi “Hanya mengubah cara penulisan nilai barang dan jasa serta instrumen pembayaran menjadi lebih ringkas, tetapi tidak mengurangi nilai riil uang.” Contoh populer seperti mengubah Rp1.000 menjadi Rp1 menjelaskan bahwa harga tetap sama meski ditulis lebih pendek (Agustina, 2019). Secara teoretis, redenominasi mereduksi komplikasi transaksi akibat inflasi jangka panjang, karena angka harga cenderung membesar dan jumlah lembar uang yang dipakai menjadi lebih banyak sehingga menyulitkan pencatatan dan perhitungan harian. Meskipun inflasi Indonesia relatif terkendali, akumulasi digit pada pecahan rupiah tetap membuat operasi sehari-hari seperti pencatatan akuntansi, manajemen kas, dan distribusi uang menjadi lebih rumit dan kurang efisien. Kompleksitas ini menambah peluang kesalahan pembukuan dan meningkatkan biaya operasional, sehingga redenominasi dipandang sebagai opsi struktural untuk menyederhanakan representasi nominal tanpa mengubah daya beli riil (Maritmahu & Maama, 2021). Argumen pendukung menyebutkan efisiensi administrasi, penurunan biaya cetak, dan perbaikan citra rupiah internasional. Sebaliknya, kritik menyoroti biaya migrasi sistem, risiko komunikasi publik, serta potensi kesalahan harga atau spekulasi selama masa transisi.

Dampak positif redenominasi sangat nyata bagi UMKM, terutama dalam ekosistem pembayaran digital seperti QRIS. Karena banyak UMKM menggunakan QRIS, BI mencatat “38,1 juta UMKM sebagai merchant QRIS pada kuartal I 2025” (Liman, 2025). Pengurangan digit nominal menyederhanakan input nilai transaksi, mengurangi kesalahan input digit, dan meningkatkan efisiensi operasional transaksi harian. Selain itu, redenominasi membantu menyederhanakan pencatatan keuangan digital sehingga laporan penjualan, pembukuan, dan integrasi dengan aplikasi kasir menjadi lebih mudah dikelola. Penggunaan dual display harga pada masa transisi dapat melindungi UMKM dari persepsi kenaikan harga serta menjaga kepercayaan konsumen. Secara keseluruhan, redenominasi dapat menjadi katalis bagi digitalisasi UMKM yang lebih inklusif dan efisien (Rizaldi & Zamaya, 2025).

Posisi UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat strategis. Pada tahun 2024 terdapat 66 juta pelaku UMKM dengan kontribusi 61% PDB atau setara Rp9.580 triliun, dan UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja nasional. Lebih dari 99 persen unit usaha di Indonesia merupakan usaha mikro (Yolanda, 2024; Kholifah & Andini, 2024; Deny, 2024; Arifa et al., 2025). UMKM juga berkontribusi 15,7% terhadap ekspor nasional dan dianggap sebagai sarana pemberdayaan masyarakat (Kholifah & Andini, 2024; Aprieni et al., 2024). Pemerintah mempertahankan momentum pertumbuhan

UMKM melalui pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan UMI serta target digitalisasi 40 juta UMKM pada tahun 2024 setelah 17,2 juta UMKM terdigitalisasi pada 2022 (Mainake, 2022; Indonesia, 2021). Namun UMKM masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal, akses pasar, kemampuan manajerial, literasi digital, dan inovasi produk (Arifa et al., 2025; Zhahirah et al., 2023; Kodu et al., 2025).

Transformasi pembayaran digital semakin pesat sejak diperkenalkannya QRIS pada 2019. QRIS dikembangkan untuk membuat transaksi “Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Andal (CEMUMUAH)” (Bank Indonesia, 2020), dan dijadikan pilar utama dalam “Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025” (BSPI, 2025). Selain QRIS, dompet digital seperti OVO, GoPay, ShopeePay, dan Dana memperkuat pergeseran perilaku konsumen menuju sistem pembayaran non-tunai. Namun transformasi digital juga menghadirkan tantangan seperti risiko keamanan data, privasi, dan kesenjangan digital, sehingga memerlukan intervensi kebijakan agar transformasi ini tidak meninggalkan kelompok masyarakat tertentu (Az-zahra dan Aini, 2025).

Transformasi pembayaran digital menunjukkan hubungan semakin kuat antara teknologi, perilaku konsumen, dan proses bisnis UMKM. Dengan sistem digital yang semakin matang, penyesuaian harga dan pencatatan pada masa redenominasi berpotensi menjadi lebih sederhana sehingga mendukung kesiapan UMKM dan konsumen. Analisis SWOT terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman menjadi alat penting untuk memahami kesiapan kedua kelompok dalam menghadapi kebijakan redenominasi di tengah digitalisasi.

Penelitian mengenai redenominasi selama ini masih didominasi oleh kajian makroekonomi, seperti stabilitas harga dan persepsi publik, sehingga belum menyentuh persoalan praktis yang dihadapi pelaku usaha kecil. Di sisi lain, riset mengenai UMKM dan QRIS umumnya berdiri sendiri fokus pada digitalisasi pembayaran tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap transisi nilai nominal rupiah. Akibatnya, belum ada penelitian yang secara komprehensif menghubungkan redenominasi, UMKM, dan QRIS dalam satu kerangka analisis, termasuk belum tersedianya analisis *ex-ante* yang menilai kesiapan UMKM sebelum kebijakan redenominasi diterapkan. Kekosongan inilah yang menjadi landasan pentingnya penelitian ini, sekaligus membuka ruang untuk kebaruan ilmiah.

Pembaharuan ini muncul dari penggabungan dua analisis besar : kesiapan UMKM dalam menggunakan QRIS dan kesiapan menghadapi redenominasi, sesuatu yang belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek teknis atau persepsi secara parsial, tetapi mengintegrasikan data lapangan dengan empat aspek analisis literasi keuangan, kesiapan digital, kesiapan operasional, dan persepsi terhadap kebijakan untuk memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai kondisi nyata UMKM. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi celah teoretis yang selama ini terabaikan, tetapi juga menghasilkan rekomendasi intervensi yang kontekstual dan aplikatif, sehingga temuan yang dihasilkan memiliki nilai guna langsung bagi pembuat kebijakan maupun pelaku UMKM dalam menghadapi potensi penerapan redenominasi di tengah ekosistem pembayaran digital yang terus berkembang.

Redenominasi rupiah adalah kebijakan pemerintah untuk menyederhanakan nilai mata uang dengan menghapus beberapa angka nol dari nominal rupiah tanpa mengubah nilai riilnya. Menurut Karnadi & Adijaya (2017), redenominasi didefinisikan sebagai “proses mengurangi nilai mata uang dengan rasio tertentu tanpa mengubah nilai tukar riil”. Studi mereka menunjukkan bahwa redenominasi cenderung menurunkan laju inflasi dan meningkatkan PDB per kapita suatu negara Keberhasilannya redenominasi

tergantung pada kondisi makro (stabilitas harga, kredibilitas kebijakan) dan kesiapan infrastruktur pembayaran modern yang semakin mendominasi transaksi ritel, termasuk QRIS. Studi empiris dan kajian kebijakan di Indonesia menekankan bahwa tanpa persiapan sistemik termasuk kesiapan merchant digital redenominasi berisiko menimbulkan gangguan administratif dan persepsi publik yang keliru terhadap harga.

Selain hal itu ada juga tantangan yang akan datang teori *money illusion* sering muncul setelah redenominasi. Teori ini menyatakan bahwa karena perubahan nominal uang, sebagian masyarakat termasuk pelaku UMKM sering keliru menilai harga barang menjadi lebih murah padahal nilai riilnya sama (Priyono et al, 2019). Misalnya, jika Rp1.000 diubah menjadi Rp1, beberapa pelaku usaha mungkin mengira harga “turun” tanpa menyadari bahwa satuan harga juga berubah. Efek *money illusion* seperti ini dapat menimbulkan kebingungan dalam menetapkan harga dan membuat keputusan pembelian. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi diperlukan agar UMKM memahami bahwa penghilangan nol adalah penyesuaian format, bukan pemotongan nilai.

Teori literasi keuangan Lusardi & Mitchell (2014) sangat relevan dalam konteks ini. Lusardi & Mitchell mendefinisikan literasi keuangan sebagai “kemampuan seseorang untuk memproses informasi ekonomi dan membuat keputusan keuangan yang tepat”. Mereka memandang pengetahuan keuangan sebagai investasi dalam modal manusia yang memungkinkan individu memperoleh hasil ekonomi lebih baik dalam jangka Panjang. Bagi pelaku UMKM, literasi keuangan yang tinggi berarti lebih siap memahami implikasi redenominasi: mereka mampu menghitung ulang harga, memprediksi dampak inflasi, dan mengelola arus kas tanpa terjebak *money illusion*. Dengan demikian, literasi keuangan menjadi landasan untuk mengelola keuangan usaha yang efektif saat peralihan nominal mata uang terjadi.

Sementara itu, Davis (1989) mengembangkan *Technology Acceptance Model* (TAM) untuk menjelaskan penerimaan teknologi baru. Dalam TAM, dua faktor kunci adalah *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*. *Perceived usefulness* didefinisikan sebagai “*degree to which a person believes that using a particular system would enhance his or her job performance*”. sedangkan *perceived ease of use* adalah “*degree to which a person believes that using a particular system would be free of effort*”. Artinya, seorang pelaku UMKM akan lebih mungkin mengadopsi teknologi pembayaran baru (seperti QRIS) jika ia yakin teknologi tersebut membantu meningkatkan efisiensi usaha dan mudah digunakan. Dalam konteks ekosistem pembayaran digital QRIS, TAM menunjukkan bahwa persepsi kegunaan (misalnya memperluas pasar, mengurangi biaya tunai) dan persepsi kemudahan (misalnya proses instalasi dan pelatihan yang sederhana) sangat menentukan penerimaan sistem QR code ini oleh UMKM.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara narasumber (pelaku UMKM dan konsumen) untuk menggali pengalaman langsung, serta studi dokumen yang memadukan berbagai data dari regulasi, laporan, dan artikel ilmiah. Data dianalisis menggunakan analisis tematik dengan mengelompokkan temuan berdasarkan pola dan isu utama. Pendekatan ini memberikan cara ilmiah yang praktis dan sistematis dalam memperoleh serta mengolah data agar relevan dengan tujuan penelitian.

HASIL

1. Tingkat Kesiapan UMKM dalam Memanfaatkan QRIS sebagai Sistem Pembayaran Digital yang Mendukung Proses Transisi Redenominasi Ditinjau dari Aspek Pemahaman, Pembukuan, Penetapan Harga, dan Penggunaan Pembayaran Digital.

Saat ini, banyak UMKM di Indonesia yang telah memberlakukan sistem pembayaran digital sebagai salah satu metode transaksi untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan layanan bagi konsumen. Penerimaan dan pemanfaatan teknologi pembayaran digital ini dapat dijelaskan melalui *Technology Acceptance Model* (TAM), yang menyatakan bahwa tingkat penerimaan pengguna terhadap teknologi dipengaruhi oleh *perceived usefulness* (persepsi manfaat) dan (persepsi kemudahan penggunaan). Semakin besar manfaat yang dirasakan dan semakin mudah teknologi tersebut digunakan, maka semakin tinggi pula tingkat penerimaan serta kesiapan pelaku usaha dalam menerapkannya. Dalam konteks penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara langsung terhadap beberapa pelaku UMKM dan konsumen untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesiapan masing-masing dalam menghadapi kebijakan redenominasi apabila kebijakan tersebut benar-benar ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dari para responden UMKM, diperoleh gambaran mengenai tingkat kesiapan pelaku usaha dalam memanfaatkan QRIS sebagai sistem pembayaran digital yang mendukung proses transisi redenominasi. Untuk memahami kesiapan tersebut secara lebih komprehensif, penelitian ini mengkaji beberapa aspek utama yang menjadi indikator kesiapan, yaitu aspek pemahaman, pembukuan, penetapan harga, dan penggunaan pembayaran digital. Uraian setiap aspek disajikan untuk menunjukkan kondisi aktual UMKM terhadap penggunaan QRIS dalam mendukung transisi sistem keuangan.

Aspek Pemahaman

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman UMKM mengenai pemanfaatan sistem pembayaran digital QRIS dalam mendukung proses transisi redenominasi masih berada pada kategori sedang. Salah satu pelaku usaha menyatakan bahwa “skala 3 lah, nggak terlalu paham” (UMKM3, 2025), sebuah ungkapan yang mencerminkan keraguan dan ketidakpastian dalam memahami prosedur QRIS secara optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa literasi digital dan finansial pelaku UMKM belum sepenuhnya siap mendukung perubahan sistem keuangan, terutama jika dikaitkan dengan rencana transisi redenominasi yang memerlukan pemahaman akurat terkait konversi nominal dan pencatatan transaksi. Temuan tersebut sejalan dengan perspektif teori *financial literacy* yang menegaskan bahwa tingkat literasi yang lebih tinggi akan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan finansial, efektivitas operasional, serta kemampuan adaptasi terhadap kebijakan baru dan dinamika pasar.

Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan pemahaman melalui edukasi yang komprehensif dan pendampingan berbasis kebutuhan agar UMKM mampu memanfaatkan QRIS secara lebih percaya diri dan siap menghadapi perubahan nilai nominal pada sistem pembayaran digital.

Aspek Pembukuan

Berdasarkan temuan penelitian, sebagian besar UMKM masih mengelola pembukuan secara manual atau kombinasi manual-digital, sehingga kemampuan pencatatan transaksi berbasis QRIS belum optimal. Beberapa responden mengungkapkan kondisi pembukuan mereka, misalnya: “Ada laporan keuangan menggunakan *Excel*, tapi setelah redenominasi masih abu-abu” dan “Ada catatan penghasilan

mah, catat manual” (UMKM4 & UMKM2, 2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian pelaku usaha sudah mencoba menggunakan pembukuan digital, masih terdapat kebingungan dan ketidakpastian dalam menyesuaikan catatan dengan perubahan nominal jika nanti kebijakan redenominasi diterapkan.

Kondisi ini menandakan bahwa pencatatan transaksi digital belum menjadi praktik rutin, sehingga risiko kesalahan pembukuan dan ketidakakuratan laporan keuangan tetap tinggi. Pembukuan digital yang terintegrasi dengan QRIS memungkinkan pelaku usaha untuk secara otomatis mencatat setiap transaksi, memudahkan pelacakan arus kas, dan menyesuaikan catatan dengan perubahan nominal jika nanti kebijakan redenominasi diterapkan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pembukuan melalui pelatihan penggunaan aplikasi digital, pendampingan praktis, serta sosialisasi pentingnya integrasi QRIS menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesiapan UMKM menghadapi transisi pembayaran digital dan redenominasi.

Aspek Penetapan Harga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM belum sepenuhnya siap menyesuaikan penetapan harga dalam menghadapi redenominasi rupiah. Salah satu responden menyampaikan, “Tidak ada pembulatan harga sih” (UMKM1, 2025), yang menunjukkan bahwa pelaku usaha belum melakukan penyesuaian harga atau strategi pembulatan nominal setelah pengurangan nol dalam mata uang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebingungan bagi pelanggan maupun kesulitan dalam pencatatan transaksi, terutama saat sistem pembayaran digital seperti QRIS digunakan. Penerapan strategi pembulatan harga dan penyesuaian nominal dalam sistem digital akan memudahkan transaksi, mengurangi risiko kesalahan pencatatan, serta menjaga kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan praktis dan edukasi mengenai konversi harga serta penetapan harga digital agar UMKM mampu menyesuaikan harga secara tepat dan konsisten selama transisi redenominasi.

Aspek Pembayaran Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas UMKM sudah aktif menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran utama. Berdasarkan wawancara, semua responden melaporkan bahwa sekitar 70% transaksi dilakukan melalui QRIS, sementara penggunaan tunai semakin jarang. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi pembayaran digital telah meningkat secara signifikan, dan pelaku usaha mulai merasakan kemudahan transaksi tanpa harus tergantung pada uang tunai. Dari perspektif literasi finansial dan adopsi teknologi, penggunaan QRIS yang dominan berkontribusi pada efisiensi operasional, transparansi transaksi, dan kesiapan menghadapi kebijakan moneter baru seperti redenominasi rupiah (Sari, Sudarma & Suherman, 2025). Meskipun sudah jarang menggunakan tunai, tetap diperlukan pendampingan dan edukasi lanjutan untuk memastikan QRIS digunakan secara optimal, termasuk integrasi dengan pembukuan digital, pemahaman biaya transaksi, dan strategi layanan pelanggan digital. Dengan demikian, UMKM tidak hanya siap menghadapi transisi pembayaran digital, tetapi juga mendukung kelancaran proses redenominasi rupiah secara efektif.

Berdasarkan empat aspek kesiapan UMKM dalam menghadapi redenominasi rupiah dan memanfaatkan QRIS, analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) menunjukkan bahwa UMKM memiliki kekuatan berupa adaptasi awal terhadap digitalisasi, dengan mayoritas transaksi sudah menggunakan QRIS dan sebagian pembukuan sudah digital. Namun, terdapat kelemahan, seperti pemahaman yang masih sedang, pembukuan belum sepenuhnya adaptif, penetapan harga belum sistematis,

dan penggunaan QRIS belum sepenuhnya konsisten. Terdapat peluang dari program edukasi, pendampingan, integrasi QRIS dengan pembukuan, dan insentif digital, sementara ancaman meliputi kebingungan pelanggan terhadap perubahan nominal, resistensi terhadap teknologi, risiko kesalahan pembukuan, dan ketergantungan pada jaringan internet. Dengan memanfaatkan peluang dan mengatasi kelemahan, UMKM dapat meningkatkan kesiapan mereka dalam transisi QRIS dan redenominasi secara optimal.

2. UMKM Readiness Framework Berdasarkan Perspektif UMKM dan Konsumen Terhadap Redenominasi Rupiah

Persamaan Perspektif Sebagai Common Ground

Berdasarkan wawancara UMKM dan survei konsumen, terdapat kesenjangan dan keselarasan perspektif yang perlu diintegrasikan dalam sebuah framework kesiapan. Secara umum kedua pihak sepakat bahwa harga dan nilai fundamental tidak berubah, mendukung tujuan pemerintah, mengakui dominasi QRIS dalam transisi digital, dan menganggap edukasi sebagai hal yang sangat penting. Persamaan ini menciptakan baseline optimisme bahwa redenominasi bukan transformasi radikal, melainkan penyederhanaan nominal.

Baik UMKM maupun konsumen memahami dan mendukung tujuan pemerintah membongkar pencucian uang. Insight ini digunakan framework untuk menentukan bahwa edukasi tentang rationale kebijakan bukan hanya informatif tetapi juga persuasif dalam meningkatkan *compliance dan adoption rate*. Kedua pihak mengakui dominannya QRIS dalam transisi digital. Data dari UMKM menunjukkan penggunaan QRIS yang signifikan, dari UMKM tiga dan empat mencatat 70% transaksi QRIS, 30% tunai, sementara konsumen 1, 2, 3 mendominasi QRIS karena praktis dan mudah untuk digunakan.

Konsumen dan UMKM sama-sama menganggap edukasi sangat penting. Dari sisi konsumen 1 dan 2 "belum pernah dengar" redenominasi *awareness* masih rendah, sementara konsumen 3 & 4 hanya mengetahui sekilas, ingin edukasi lebih mendalam. Kebutuhan ini menjadi justifikasi untuk pengetahuan dan edukasi dengan strategi "*Campaign* edukasi bertingkat (*awareness* → *understanding* → *action*)."
Framework merekomendasikan konten diferensiasi seperti konten kreatif di media sosial dan FAQ yang mudah dipahami oleh semua segmen.

Perbedaan ini menghasilkan dua lintas strategi intervensi yang berbeda. UMKM 4 mengalami kesulitan dengan nominal Rp750 dan Rp1.500 dan *framework* memprioritaskan komunikasi untuk konsumen tentang kesalahan transaksi. *Framework* memprioritaskan "*Assurance Mechanism*" dalam komunikasi (untuk konsumen) dan menciptakan dimensi operasional dan proses bisnis yang mencakup *pricing strategy*, manajemen kasir, dan *reconciliation* untuk membantu mengatur aspek-aspek operasional agar proses bisnis berjalan lancar, terukur, dan akurat (untuk UMKM).

Kerangka kesiapan ini mencakup empat pilar utama, yaitu dimensi teknologi dan sistem (memastikan infrastruktur digital, dari level 1 manual hingga level 4 *full* digital, melalui strategi intervensi seperti subsidi sistem pos dan *test-run*), dimensi operasional dan proses bisnis (mengoptimalkan adaptasi melalui manajemen inventori, *strategi pricing* yang jelas misalnya untuk harga Rp5.400), dimensi *payment method readiness* (mendorong transisi dari tunai ke digital dengan fokus pada adopsi QRIS melalui subsidi biaya atau *fee* dan sosialisasi keamanan), serta dimensi pengetahuan dan edukasi (meningkatkan

pemahaman melalui campaign bertingkat, konten kreatif, *workshop offline*, dan melibatkan UMKM *champion*).

Berdasarkan analisis, tujuan ini mendorong transisi dari tunai ke digital dengan fokus pada QRIS. Untuk Indikator Kesiapannya berupa, QRIS *adoption rate* (persen transaksi via QRIS vs tunai), *payment gateway integration* (ketersediaan multiple *payment options*), *cashless transaction comfort* (kepercayaan pelanggan terhadap digital *payment*), *e-wallet infrastructure* (UMKM ready dengan *e-wallet* lain seperti ovo, gopay, dll). Karena dari hasil wawancara mencatat 70% transaksi QRIS dan 30% tunai, hal ini menunjukkan transisi sedang berlangsung.

Framework ini mengintegrasikan perspektif UMKM dan konsumen ke dalam empat komponen readiness yang saling terhubung. Setiap komponen memiliki indikator kesiapan, *stakeholder roles*, dan strategi intervensi yang spesifik. *Framework* ini dirancang untuk menjadi *diagnostic tool* bagi pemerintah, guidance untuk UMKM, dan assurance mechanism bagi konsumen. *Knowledge Readiness* mengukur tingkat pemahaman dan literasi *stakeholder* terhadap mekanisme redenominasi rupiah, termasuk dampak ekonomi, cara kerja sistem baru, dan implikasi transaksi bisnis. Komponen ini fokus pada pengetahuan faktual tentang redenominasi dan pelatihan teknis. Untuk indikator Kesiapan berupa, tingkat literasi UMKM tentang mekanisme redenominasi (pemahaman nilai konversi, cara konversi), pemahaman konsumen tentang perubahan nilai uang dan cara bertransaksi, pelatihan staf UMKM dalam *handling* sistem pembukuan baru, dan aksesibilitas materi edukasi dalam berbagai bahasa dan format.

System Readiness (Kesiapan Sistem) mengukur kesiapan infrastruktur teknologi, sistem pembayaran, dan mekanisme operasional untuk mendukung transaksi dengan rupiah redenominasi. Fokus pada sistem QRIS, mekanisme pembulatan harga, dan sistem informasi pembukuan. Untuk indikator Kesiapan berupa, adopsi QRIS sebagai platform pembayaran digital terpadu, kapabilitas sistem kas register dan POS untuk handling perubahan nilai nominal, sistem *e-wallet* yang terintegrasi dengan nilai rupiah baru, *software* akuntansi UMKM yang kompatibel dengan perubahan denominasi, dan infrastruktur ATM dan banking channel yang siap melayani transaksi rupiah baru.

Behavior Readiness mengukur tingkat adopsi perilaku transaksi yang diinginkan, khususnya *shift* dari *cash* ke *cashless payment* dan preferensi konsumen terhadap instrumen pembayaran. Fokus pada pembentukan kebiasaan dan perubahan *mindset* terhadap uang digital. Untuk indikator Kesiapan berupa, tingkat adopsi dan frekuensi penggunaan QRIS dan *e-wallet* oleh konsumen, *comfort level* UMKM dan konsumen terhadap transaksi *cashless*, preferensi konsumen terhadap instrumen pembayaran berbeda (tunai, debit, *e-wallet*, QRIS), persepsi risiko dan kepercayaan terhadap sistem pembayaran digital dan intensi konsumen untuk mengurangi penggunaan tunai pasca-redenominasi

Institutional Readiness mengukur kesiapan struktural dan koordinasi antar institusi pemerintah, regulasi, dan *framework* untuk mendukung transisi redenominasi yang *smooth*. Fokus pada peran pemerintah sebagai regulator, *policy maker*, dan koordinator. Untuk indikator Kesiapan berupa, kejelasan peran dan tanggung jawab antar institusi dalam redenominasi, efektivitas koordinasi lintas kementerian dan *stakeholder*, kualitas dan konsistensi regulasi yang dikeluarkan, kapabilitas *enforcement* terhadap regulasi dan *compliance monitoring*, transparansi komunikasi pemerintah kepada publik dan *responsiveness* terhadap *feedback* dan *emerging issue*

Framework ini mengintegrasikan perspektif UMKM dan konsumen untuk menciptakan *roadmap* implementasi redenominasi yang inklusif. Analisis menunjukkan bahwa dengan dukungan teknologi yang

tepat, edukasi yang komprehensif, dan *timeline* yang realistis, kedua pihak siap menghadapi redenominasi. Kunci kesuksesan adalah pilot phase yang kuat, dukungan infrastruktur, dan kolaborasi *ecosystem* antara pemerintah, UMKM, *fintech*, dan konsumen. Redenominasi bukan sekadar perubahan nominal, melainkan kesempatan untuk mempercepat digitalisasi ekonomi Indonesia dengan memastikan tidak ada yang tertinggal dalam transisi ini.

3. Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Kesiapan UMKM dalam Menghadapi Redenominasi

Proses transisi menuju redenominasi mengharuskan UMKM dan konsumen untuk siap dalam beberapa aspek, diantaranya: pengetahuan, kapasitas operasional, serta adaptasi terhadap sistem pembayaran digital. Temuan wawancara pada pelaku UMKM memperlihatkan terjadinya dinamika pemahaman: salah satu responden hanya mengetahui bahwa redenominasi merupakan “pembulatan angka dari 1.000.000 jadi 1.000” (UMKM3, 2025), sementara yang lain menyebut bahwa kebijakan ini “nggak berdampak karena harga sama, nominal sama” (UMKM1, 2025). Adanya interpretasi yang tidak seragam mengenai perubahan nominal dan implikasi ini menunjukkan risiko *money illusion*, yaitu kecenderungan menilai harga berdasarkan angka nominal, bukan riil, sehingga potensi kesalahan baca harga dan salah transfer dapat muncul pada awal transisi.

Selain adanya tantangan pemahaman, UMKM juga menyoroti potensi hambatan teknis yang mungkin timbul jika kebijakan redenominasi diterapkan. Sebagai contoh, banyak UMKM yang telah mengadopsi sistem pembayaran digital seperti QRIS, bahkan pada beberapa usaha, transaksi digital mendominasi hingga 70%. Namun, pelaku usaha mengaku masih menemui hambatan teknis seperti keterlambatan proses masuknya dana QRIS, kebingungan terkait masalah pembulatan harga, dan penyesuaian nominal kecil seperti Rp 750 atau Rp 1.500 yang membuat mereka memilih untuk “nunggu kebijakan pemerintah dulu” (UMKM4, 2025). Temuan ini menunjukkan kemungkinan kurangnya kesiapan teknis sistem pembayaran digital yang perlu diperhatikan untuk beradaptasi dengan denominasi baru ketika kebijakan diterapkan. Hambatan-hambatan potensial ini dapat dijelaskan oleh Model Penerimaan Teknologi (TAM), yang menekankan bahwa penerimaan teknologi sangat ditentukan oleh persepsi tentang kemudahan penggunaan dan kehandalannya. Jika sistem QRIS tidak dipersiapkan untuk menampilkan nilai nominal baru dengan jelas dan konsisten, tingkat penerimaan di kalangan UMKM mungkin menurun pada tahap awal implementasi kebijakan.

Di sisi lain, teori *financial literacy* (Lusardi & Mitchell, 2014) menunjukkan bahwa pemahaman tentang nilai uang merupakan landasan penting bagi pelaku ekonomi untuk menghadapi perubahan struktural. Pernyataan dari beberapa UMKM seperti “perlu ikut sosialisasi redenominasi” (UMKM3, 2025) dan “perlu waktu adaptasi dan perlu sosialisasi” (UMKM2, 2025) menegaskan bahwa persiapan literasi harus dilakukan secara merata. Oleh karena itu, jika redenominasi diterapkan, UMKM berpotensi menghadapi berbagai tantangan berupa rendahnya literasi kebijakan, risiko kesalahan persepsi nominal, dan ketidaksiapan sistem digital dimana hal-hal tersebut memerlukan dukungan kebijakan yang terencana dan komprehensif.

Berdasarkan temuan dari penelitian lapangan dan tinjauan literatur, rekomendasi kebijakan yang dapat diusulkan meliputi:

Penguatan Literasi Redenominasi bagi UMKM

Sebagian pelaku UMKM masih memiliki pemahaman yang belum sepenuhnya utuh mengenai redenominasi, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan. Jika kebijakan ini diterapkan tanpa peningkatan literasi, terdapat risiko terjadinya salah persepsi nilai uang (*money illusion*) dan penetapan harga yang kurang akurat selama masa transisi. Untuk itu, pemerintah bersama Bank Indonesia perlu melakukan sosialisasi dan edukasi yang berkesinambungan dengan metode yang inklusif dan mudah diakses pelaku UMKM, seperti pelatihan daring, *workshop* langsung di komunitas melalui kecamatan, koperasi, dan sentra kuliner, serta modul digital yang sederhana. Pendekatan ini fokus kepada pelaku usaha mikro dan tradisional agar tidak ada kelompok yang tertinggal dalam pemahaman. Selain itu, pemanfaatan simulator harga digital sangat penting untuk membantu para pelaku UMKM dalam mempraktikkan dan memahami perubahan dari nominal lama ke nominal baru, sehingga dapat mengurangi risiko salah hitung dan membuat proses adaptasi menjadi lebih lancar.

Standardisasi Penetapan Harga dan Pembulatan Nasional

Banyak UMKM menghadapi tantangan dalam menyesuaikan harga saat terjadi perubahan denominasi rupiah, terutama untuk barang dan jasa dengan nilai kecil yang rentan menimbulkan pembulatan tidak konsisten. Untuk mengatasi hal ini, penting bagi pemerintah untuk menetapkan aturan pembulatan harga secara nasional. Misalnya dengan melakukan pembulatan ke 0,05 atau 0,1 rupiah baru agar seluruh transaksi tetap efisien dan konsisten di seluruh sektor usaha. Selain itu, penyedia aplikasi pembayaran digital seperti QRIS perlu diwajibkan untuk menampilkan harga dalam dua nominal, baik lama maupun baru, selama masa transisi redenominasi berlangsung. Langkah ini bertujuan mencegah kebingungan bagi pelaku usaha maupun konsumen, meningkatkan transparansi, dan memberikan waktu adaptasi yang cukup hingga semua pihak dapat bertransisi secara optimal.

Modernisasi dan Penyesuaian Sistem QRIS dan Infrastruktur Pembayaran Digital

Modernisasi sistem QRIS dan infrastruktur pembayaran digital menjadi salah satu kunci keberhasilan transisi redenominasi, terutama bagi UMKM yang sehari-hari menghadapi tantangan teknis seperti lamanya saldo masuk dan ketidakpastian penyesuaian nominal baru. Dari sudut pandang *technology acceptance model* (TAM), hambatan sistem tersebut dapat menurunkan persepsi kemudahan dan manfaat penggunaan bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, QRIS dan seluruh penyedia *e-wallet* perlu diwajibkan untuk melakukan pembaruan otomatis pada sistem mereka, sehingga konversi nominal redenominasi dapat berlangsung tanpa proses input manual oleh pengguna. Selama masa transisi, implementasi dual display yakni harga lama dan harga redenominasi akan menjadi sangat penting untuk mencegah risiko salah transfer maupun pembulatan harga yang kurang tepat, serta harus didukung oleh monitoring adaptasi dan pelaporan masalah secara berkala agar dapat segera diperbaiki jika ditemukan kendala di lapangan. Agar proses pembaruan berjalan lancar, pemerintah juga perlu mengawal kebijakan subsidi bagi UMKM terkait *upgrade* perangkat kasir, aplikasi pembayaran digital, dan migrasi data guna menekan beban tambahan yang mungkin timbul selama masa penyesuaian.

Penguatan Peran Pemerintah sebagai Regulator & Pengawas

Peran pemerintah sebagai regulator dan pengawas sangat krusial untuk memastikan keberhasilan proses transisi redenominasi rupiah bagi UMKM dan konsumen. Kejelasan regulasi dan dukungan institusi menjadi landasan utama, sehingga penetapan periode transisi bertahap selama 1–2 tahun sangat penting agar masyarakat dan pelaku usaha dapat menyesuaikan diri secara bertahap sebelum rupiah lama sepenuhnya ditarik dari peredaran. Selama masa transisi, penerapan *dual price tag* diwajibkan di seluruh

merchant, guna menjaga transparansi dalam penetapan harga. Sosialisasi kebijakan harus melibatkan komunitas UMKM sebagai mitra resmi agar kendala lapangan dapat segera diidentifikasi dan solusi dapat diimplementasikan bersama. Penegakan hukum tegas terhadap tindakan penipuan dan manipulasi harga akan melindungi pelaku UMKM serta konsumen dari dampak “inflasi psikologis” atau ketidakpastian selama proses adaptasi redenominasi.

Pendampingan Pembukuan dan Digitalisasi Administrasi

Pendampingan pembukuan dan digitalisasi administrasi menjadi penting dalam mendukung kesiapan UMKM menghadapi redenominasi. Sebagian pelaku usaha memang sudah beradaptasi dengan pencatatan pendapatan berbasis QRIS dan aplikasi digital, tetapi masih terdapat UMKM yang merasa sistem mereka “abu-abu” atau belum jelas apakah mampu menyesuaikan nominal baru secara akurat. Oleh sebab itu, literasi keuangan UMKM perlu diperkuat melalui edukasi langsung dan kolaborasi intensif dengan institusi pendukung maupun pelaku *fintech*, agar UMKM mampu menggunakan fitur-fitur pembayaran digital, pencatatan keuangan, dan konversi nominal dengan tepat. Penyediaan hotline serta layanan konsultasi teknis gratis selama masa transisi juga sangat membantu UMKM untuk segera menyelesaikan kendala praktis maupun kebingungan sistem digital, sehingga proses penyesuaian administrasi berjalan lancar dan risiko kesalahan dapat diminimalisir. Pendekatan ini bukan hanya meningkatkan ketelitian pencatatan, tetapi juga memperkuat daya saing dan ketahanan UMKM dalam menghadapi perubahan struktural redenominasi rupiah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesiapan UMKM dalam menghadapi redenominasi rupiah melalui pemanfaatan sistem pembayaran digital QRIS berada pada kategori sedang menuju siap. Dari aspek pemahaman, sebagian UMKM masih memerlukan edukasi terkait mekanisme QRIS dan konsekuensi redenominasi. Pada aspek pembukuan, sebagian pelaku usaha sudah menggunakan *Excel* atau aplikasi digital, tetapi sebagian lain masih mencatat secara manual dan belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan nominal. Penetapan harga belum sistematis, sedangkan penggunaan QRIS sudah dominan (sekitar 70% transaksi) dan penggunaan tunai semakin jarang, menjadi kekuatan utama kesiapan digital UMKM.

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa kesiapan UMKM tidak hanya bergantung pada adopsi teknologi pembayaran digital, tetapi juga pada kemampuan adaptasi terhadap perubahan kebijakan dan perilaku konsumen. UMKM yang memiliki pembukuan digital yang rapi, strategi penetapan harga yang sistematis, dan pemahaman yang memadai tentang QRIS dan redenominasi cenderung lebih siap menghadapi transisi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas UMKM melalui pendampingan teknis, sosialisasi kebijakan, dan pelatihan literasi finansial menjadi langkah strategis yang dapat meningkatkan ketahanan usaha, memperlancar proses transisi redenominasi, serta mendorong transformasi digital UMKM secara berkelanjutan.

Kesuksesan implementasi bergantung pada komitmen jangka panjang pemerintah dalam menyediakan dukungan infrastruktur berkelanjutan dan ekosistem kolaboratif. Untuk penelitian lanjutan, disarankan melakukan studi kuantitatif empiris yang lebih luas dan melaksanakan proyek percontohan

(pilot project) skala terbatas untuk menguji efektivitas kerangka kesiapan yang telah dirancang sebelum implementasi kebijakan redenominasi secara penuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N. Iaras. (2019). KAJIAN TENTANG RENCANA REDENOMINASI RUPIAH DALAM SISTEM KEUANGAN JANGKA PANJANG DI INDONESIA ABSTRACTION. ペイッククリニック学会治療指針 2, 1-9.
- Alam, S., Jamil, M., & Syamsir, A. (2022). Digital Currency in Indonesia (Prospects and Challenges in Inclusive Financial Reviews). Jurnal Ad'ministrare, 9(2), 515. <https://doi.org/10.26858/ja.v9i2.39498>
- Alhusain, A. S. (2012). Rencana Redenominasi Rupiah. Info Singkat EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK, IV(24).
- Amir, A. (2013). Redenominasi Rupiah dan Sistem Keuangan. Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah, 1(2), 91-96. <https://doi.org/10.22437/ppd.v1i2.1498>
- Andriyani F, Siagian B, Suciati P, & Citra A. (2025). Qris Adoption and Utilization: Examining Gen Z'S Digital Payment Behavior Among Indonesian Vocational Students. Jurnal Vokasi Indonesia, 13(1). <https://doi.org/10.7454/jvi.v13i1.1233>
- Angeles, R. (2021). Understanding the RFID Deployment at Sacred Heart Medical Center: Using Technology-Organization-Environment Framework Lenses. Procedia Computer Science, 196(2021), 445-453. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.12.035>
- Anisa Salsabila Kemala Fikri, & Nahda, K. (2023). The Effect of Financial Literacy on MSME Performance Through Financial Access and Financial Risk Attitude as a Mediation Variable. Jurnal Economic Resource, 6(2), 238-247. <https://doi.org/10.57178/jer.v6i2.664>
- Arifa, I., Ahmad Choiri, Wahyu Wibowo, Aminuddin, A., & Nur Azizah Panggabean. (2025). Peran UMKM dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional. PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora, 4(4), 5376-5385. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.9530>
- Az-zahra, M. C., & Aini, N. (2025). Peran Bank Indonesia dalam Membangun Ekosistem Pembayaran Digital yang Aman dan Inklusif. Integrating Religion, Social Economy, and Law: Conference Series, 1(2), 117-121. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/ics>
- BI. (2025). Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital. Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, 1-81. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/Blueprint-Sistem-Pembayaran-Indonesia-2025.pdf>
- Bramana Karnadi, E., & Adijaya, R. (2017). International Journal of Economics and Financial Issues Redenomination: Why is It Effective in One Country but Not in Another? International Journal of Economics and Financial Issues, 7(3), 186-195. <http://www.econjournals.com>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly: Management Information Systems, 13(3), 319-339. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Firdaus, H., Buono, A., & Syarif, R. (2025). Strategi UMKM Dalam Mendorong Masyarakat Untuk Menggunakan Qris Sebagai Alat Pembayaran Digital Di Kota Bogor. MANAJEMEN IKM: Jurnal

- Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah, 20(1), 7–15.
<https://doi.org/10.29244/mikm.20.1.7-15>
- Kholifah, A. N., & 2, C. T. A. (2024). PERAN UMKM TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA Alif. *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Manajemen*, 2(2), 91–107.
- Lisnawati. (2023). Tantangan UMKM di Tahun 2024. Isu Sepekan Bidang Ekkuinbang, Komisi VI DPR RI, 1–2. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu Sepekan---V-PUSLIT-November-2023-246.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-November-2023-246.pdf)
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
- Marimuthu, F., & Maama, H. (2021). Currency redenomination and firm value growth: Lessons from a developing economy. *Investment Management and Financial Innovations*, 18(1), 223–235. [https://doi.org/10.21511/imfi.18\(1\).2021.19](https://doi.org/10.21511/imfi.18(1).2021.19)
- Permadi, R. N., Amarulah, R., Sari, M. A. P., Prawitasari, N., Kusumaningrum, M., Wahyuni, T., Hidayah, K., Aziza, T. N., & Sartika, D. (2025). Tantangan dan Hambatan UMKM dalam melakukan Digitalisasi: Studi Kasus di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Kulon Progo, & Kota Surabaya Tahun 2024. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 175–189. <https://doi.org/10.14710/jiip.v10i2.27916>
- Priyono, Putra, B. C., & Putri, C. C. (2019). Redenomination; Between Opportunities and Challenges (The study of the implementation of the Redenomination in Indonesia). *International Journal of Business and Management*, 7(2), 5–27.
- Rizaldi, R., & Zamaya, Y. (2025). Perception of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Pekanbaru towards the Rupiah Redenomination Policy Plan. *Sosio E-Kons*, 17(1), 30. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v17i1.27766>
- Sari, R. P., Sudarma, A., & Suherman, A. (2025). Effect of Financial Literacy on the Performance of Micro, Small and Medium Enterprises in Calabar, Nigeria. *International Journal of Advances in Engineering and Management*, 7(7), 115–128. <https://doi.org/10.35629/5252-0707115128>
- Stephen, T., & Simon, O. (2024). The role of financial literacy in enhancing firm’s sustainable performance. *International Journal of Environmental Sustainability and Social Science*, 1107–1125. <https://doi.org/placeholder13>
- Indonesia, O. B. (n.d.). Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Retrieved from <https://www.bi.go.id/>: <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/qr/default.aspx>
- Konsumen1. (2025, November). (E. N. Fadhilah, Interviewer)
- Konsumen2. (2025, November). (S. S. Anggraeni, Interviewer)
- Konsumen3. (2025, November). (T. L. Verlita, Interviewer)
- Konsumen4. (2025, November). (S. S. Anggraeni, Interviewer)
- Liman, U. S. (2025, Mei 7). BI catat 38,1 juta UMKM gunakan QRIS per kuartal I 2025. Retrieved from Antara News: <https://www.antaranews.com/berita/4820493/bi-catat-381-juta-umkm-gunakan-qr-is-per-kuartal-i-2025>

- Mansur, A. (2025, November 11). Pengamat : Redenominasi Strategi Besar Bersihkan Uang Gelap. Retrieved from <https://www.neraca.co.id/>: <https://www.neraca.co.id/article/228279/pengamat-redenominasi-strategi-besar-bersihkan-uang-gelap>
- UMKM1. (2025, November). Cilunk Aslina. (Sovie Sri Anggraeni, Erna Nur Fadhillah, Theresia Linda Verlita, & Shofi Nurhasna Fatin, Interviewers)
- UMKM2. (2025, November). Rujak Dewi Unikom. (Sovie Sri Anggraeni , Erna Nur Fadhillah , Theresia Linda Verlita, & shofi Nurhasna Fatin, Interviewers)
- UMKM3. (2025, November). Potea. (Sovie Sri Anggraeni, Erna Nur Fadhillah , Theresia Linda Verlita, & Shofi Nurhasna Fatin, Interviewers)
- UMKM4. (November, 2025). Inbiskom Unikom. (sovie Sri anggraeni , Erna Nur Fadhillah, Theresia Linda Verlita, & Shofi Nurhasna Fatin, Interviewers)
- Yolandha, F. (2025, november 7). BI Buka Suara Soal Redenominasi Rupiah: Proses Direncanakan Matang. Retrieved from Republika.com: <https://ekonomi.republika.co.id/berita/t5hs2k370/bi-buka-suara-soal-redenominasi-rupiah-proses-direncanakan-matang#:~:text=%E2%80%9CRedenominasi%20rupiah%20adalah%20penyederhanaan%20jumlah,10%2F11%2F2025>